



KPK Supervisi Kasus Parwata

DENPASAR - Kasus dugaan jual beli perizinan Kondotel Avani kompleks Nusa Dua Circle, yang diduga melibatkan Ketua DPRD Badung Putu Parwata terus menggelinding. Kabar terbaru, penanganan kasus Parwata kini tidak hanya ditangani Polda Bali. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Mapolda Bali untuk melakukan supervisi atau pendampingan.

"KPK melakukan supervisi kasus ini karena diduga melibatkan Parwata sebagai pejabat publik. Jabatannya sebagai ketua dewan membuat KPK turun tangan. Beberapa hari lalu, KPK sudah ke Polda Bali," ujar sumber tepercaya *Jawa Pos Radar Bali*. Menurut sumber koran ini, kedatangan KPK karena alat bukti yang dimiliki penyidik cukup kuat ■

► Baca KPK... Hal 31

Polda Sebut sebagai Hal Wajar

■ KPK...

Sambungan dari hal 21

Namun, penyidik masih terkesan ragu untuk menentukan sebagai tersangka. Turunnya komisi antirasuah itu juga disebut karena dugaan uang suap perizinan mencapai Rp 3 miliar. "KPK ingin mendapatkan informasi sekaligus meyakinkan apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi ada info dibekingi petinggi parpol," tukas sumber yang meminta namanya tidak dikorbankan itu.

Penyidik masih terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi, di antaranya saksi ahli pidana. Penyidik harus terus menggali bukti lainnya untuk menghindari gugatan praperadilan seperti keterangan ahli. Data yang didapat koran ini, kasus ini terjadi sekitar tahun 2014 lalu. Saat itu investor Avani Kondotel melalui direktur

perusahaan berinisial CR, diduga bertemu dengan Parwata yang saat itu masih jadi anggota DPRD Badung. Dalam pertemuan tersebut membahas keinginan perusahaan yang berencana mencari izin prinsip untuk pembangunan kondotel dengan uang "pelicin" diduga mencapai miliaran. Terkait supervisi KPK, Kabid Humas Polda Bali AKBP Hengky Widjaja menyebut hal tersebut sebagai hal wajar. "Kalau itu memang tugas KPK ya silakan laksanakan saja tugas itu. Penyidik Polri juga tetap melaksanakan tupoksinya," ucapnya dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler.

Ditanyai tentang perkembangan pemeriksaan sang pimpinan dewan, Hengky menjawab pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan intensif. "Beberapa hari yang lalu, Selasa (28/2) Parwata diperiksa selama empat

jam. Penyidik menyodorkan 45 pertanyaan," tegasnya.

Secara terpisah kemarin Putu Parwata belum bisa dikonfirmasi. Koran ini juga sempat mencari di Gedung DPRD Badung namun dia tak ada. Begitu juga dikonfirmasi melalui ponsel seluler tak ada jawaban.

Nada sambungannya hidup tetapi tak ada jawaban. Hingga berita ini diturunkan Parwata tak member jawaban. Memang belakangan ini, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini jarang kelihatan. Bahkan, pada pelantikan Sekda Badung Rabu (1/3) lalu juga tidak kelihatan. Selain itu pada pergantian alat DPRD Badung juga tak kelihatan dan rapat paripurna intern dipimpin oleh wakil ketua DPRD Badung.

Seperti diberitakan sebelumnya, Parwata menuding semua yang ditujukan kepadanya itu

tidak benar. "Bahwa saya tidak ada menangani izin, saya tidak menangani izin kondotel itu. Dan, saya tidak ada menerima uang," bantah Parwata saat dikonfirmasi Selasa (31/1) lalu. Ketua DPRD Badung ini menuding semua data yang disodorkan itu palsu. Mulai dari nama dan tanda tangannya juga palsu. "Jadi itu semua data palsu, kuitansi palsu, nama saya palsu, tanda tangan saya palsu. Dan, itu dulu sempat dimasukkan surat kaleng. Itulah saya mengklarifikasi ke polda, alat bukti yang tidak otentik," tegas Politisi asal Dalung ini. Disinggung terkait uang miliaran rupiah, lagi-lagi dia membantah bahwa tidak ada menerima uang pengurusan izin kondotel tersebut. "Menerima dana itu tidak benar, semua yang ditujukan kepada saya itu tidak benar," tandasnya. (tim radar bali)

Edisi : Jumat, 3 Maret 2017

Hal : 21 dan 31



Setahun Rusak, Baru Struktur yang Jadi

NEGARA - Setelah setahun lebih rusak, jembatan yang berada diantara Kelurahan Dauhwaru dengan Desa Dangin Tukadaya, Kecamatan Jembrana, baru menyelesaikan beton jembatan. Padahal proyek dengan nilai kontrak Rp 12 miliar lebih itu, sudah melewati batas waktu pengerjaan.

Hingga kemarin, pembangunan struktur bangunan jembatan dari girder dan beton sudah selesai dibuat. Sehingga sudah tidak ada lagi alat berat dan para pekerja yang membangun jembatan. Sejumlah material jembatan juga belum dibersihkan di jalan yang belum diaspal itu.

Pengerjaan jembatan ini sebenarnya sempat molor, jembatan yang ambruk diterjang banjir bandang setahun lalu awalnya diberi batas waktu harus rampung akhir Desember 2016 lalu. Karena belum selesai,

Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) VIII, memberikan tambahan perpanjangan waktu pada rekanan hingga 9 Februari 2017. Sayangnya, perpanjangan waktu meleset sehingga pihak rekanan diberikan perpanjangan waktu hingga 23 Maret mendatang.

Jembatan yang merupakan Jalur lalu lintas yang menghubungkan Denpasar dan Gilimanuk, Jembrana, ambruk pada hari Sabtu 23 Januari 2016, akibat diterjang banjir pada bagian bawah jembatan, sedangkan bagian tengah jembatan yang ambrol merupakan bangunan lama yang dibangun sekitar tahun 1980. "Tidak terlihat ada pekerja," sebut beberapa warga. **(bas/gup)**

LEWAT TARGET: Pengerjaan jembatan di Kelurahan Dauhwaru molor dari batas waktu yang ditentukan.



M.BASIR/RADAR BALI

Edisi : Jumat, 3 Maret 2017

Hal : 18